

I. PENGUMUMAN NOMOR PENG - 2/PJ.09/2026

Pada tanggal 9 Januari 2026 DJP menerbitkan Pengumuman Nomor Peng - 2/PJ.09/2026 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Berikut isi pada pengumuman tersebut:

1. Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menggunakan format Formulir DGT sebagaimana diatur dalam PMK- 112/2025.
2. SKD WPLN/Formulir DGT dengan format berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang diterbitkan sebelum diundangkannya PMK- 112/2025, masih tetap berlaku sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN/Formulir DGT tersebut.
3. Penyampaian informasi dalam Formulir DGT dan pengunggahannya tetap dilakukan melalui Menu LA.03-03 Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang telah tersedia di Coretax DJP.
4. Sepanjang belum dilakukan penyesuaian format Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) sesuai dengan PMK-112/2025, dokumen SKD SPDN yang dihasilkan melalui Menu LA.03-01 Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) pada Coretax DJP tetap dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat P3B di negara atau yurisdiksi mitra P3B.

II. PENGUMUMAN NOMOR PENG - 1/PJ/2026

Pada tanggal 20 Januari 2026 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG-1/PJ/2026 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Automatic Exchange Of Financial Account Information/AEOI*) Tahun 2026 sebagai berikut:

DAFTAR YUSRISDIKSI PARTISIPAN

1. Albania	31. Denmark	61. Lebanon	91. Rwanda
2. Andorra	32. Dominica	62. Liechtenstein	92. Saint Kitts And Nevis
3. Anguilla	33. Ecuador	63. Lithuania	93. Saint Lucia
4. Antigua And Barbuda	34. Estonia	64. Luxembourg	94. Saint Vincent And The Grenadines
5. Argentina	35. Faroe Islands	65. Macau, China	95. Samoa
6. Armenia	36. Finland	66. Malaysia	96. San Marino
7. Aruba	37. France	67. Maldives	97. Saudi Arabia
8. Australia	38. Georgia	68. Malta	98. Senegal
9. Austria	39. Germany	69. Marshall Islands	99. Seychelles
10. Azerbaijan	40. Ghana	70. Mauritius	100. Singapore
11. Bahamas	41. Gibraltar	71. Mexico	101. Sint Maarten
12. Bahrain	42. Greece	72. Moldova	102. Slovak Republic
13. Barbados	43. Greenland	73. Monaco	103. Slovenia
14. Belgium	44. Grenada	74. Montserrat	104. South Africa
15. Belize	45. Guernsey	75. Nauru	105. Spain
16. Bermuda	46. Hong Kong, China	76. Netherlands	106. Sweden
17. Brazil	47. Hungary	77. New Zealand	107. Switzerland
18. British Virgin Islands	48. Iceland	78. Nigeria	108. Thailand
19. Brunei Darussalam	49. India	79. Niue	109. Trinidad & Tobago
20. Bulgaria	50. Ireland	80. Norway	110. Türkiye
21. Canada	51. Isle Of Man	81. Oman	111. Turks & Caicos Islands
22. Cayman Islands	52. Italy	82. Pakistan	112. Uganda
23. Chile	53. Jamaica	83. Panama	113. Ukraine
24. Colombia	54. Japan	84. People's Republic of China	114. United Arab Emirates
25. Cook Islands	55. Jersey	85. Peru	115. United Kingdom
26. Costa Rica	56. Kazakhstan	86. Poland	116. Uruguay
27. Croatia	57. Kenya	87. Portugal	117. Vanuatu
28. Curaçao	58. Korea	88. Qatar	
29. Cyprus	59. Kuwait	89. Romania	
30. Czechia	60. Latvia	90. Russian Federation	

DAFTAR YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN

1. Albania	32. Gibraltar	63. Nigeria
2. Andorra	33. Greece	64. Norway
3. Argentina	34. Greenland	65. Pakistan
4. Armenia	35. Grenada	66. Panama
5. Aruba	36. Guernsey	67. People's Republic of China
6. Australia	37. Hong Kong, China	68. Peru
7. Austria	38. Hungary	69. Poland
8. Azerbaijan	39. Iceland	70. Portugal
9. Barbados	40. India	71. Qatar
10. Belgium	41. Ireland	72. Russian Federation
11. Belize	42. Isle Of Man	73. Rwanda
12. Brazil	43. Italy	74. Saint Kitts And Nevis
13. Bulgaria	44. Jamaica	75. Saint Lucia
14. Canada	45. Japan	76. San Marino
15. Chile	46. Jersey	77. Saudi Arabia
16. Colombia	47. Kazakhstan	78. Senegal
17. Cook Islands	48. Kenya	79. Seychelles
18. Costa Rica	49. Korea	80. Singapore
19. Croatia	50. Latvia	81. Slovak Republic
20. Curaçao	51. Liechtenstein	82. Slovenia
21. Cyprus	52. Lithuania	83. South Africa
22. Czech Republic	53. Luxembourg	84. Spain
23. Denmark	54. Malaysia	85. Sweden
24. Ecuador	55. Maldives	86. Switzerland
25. Estonia	56. Malta	87. Thailand
26. Faroe Islands	57. Mauritius	88. Türkiye
27. Finland	58. Mexico	89. Uganda
28. France	59. Moldova	90. Ukraine
29. Georgia	60. Monaco	91. United Kingdom
30. Germany	61. Netherlands	92. Uruguay
31. Ghana	62. New Zealand	

(ketentuan mengenai AEoI diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025).

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 April 2026 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/MK/EF.2/2026, 6 Januari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 Januari 2026 Sampai Dengan 13 Januari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/MK/EF.2/2026, 13 Januari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Januari 2026 Sampai Dengan 20 Januari 2026.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/MK/EF.2/2026, 20 Januari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Januari 2026 Sampai Dengan 27 Januari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/MK/EF.2/2026, 27 Januari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 Januari 2026 Sampai Dengan 3 Februari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/MK/EF/2026, 30 Januari 2026.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2026 Sampai Dengan 28 Februari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/MK/EF.2/2026, 3 Februari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Februari 2026 Sampai Dengan 10 Februari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/MK/EF.2/2026, 10 Februari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Februari 2026 Sampai Dengan 17 Februari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/MK/EF.2/2026, 17 Februari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Februari 2026 Sampai Dengan 24 Februari 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/MK/EF.2/2026, 24 Februari 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Februari 2026 Sampai Dengan 3 Maret 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/MK/EF.2/2026, 28 Februari 2026.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2026 Sampai Dengan 31 Maret 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/MK/EF.2/2026, 3 Maret 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak

	Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 4 Maret 2026 Sampai Dengan 10 Maret 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 11/MK/EF.2/2026, 10 Maret 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 11 Maret 2026 Sampai Dengan 17 Maret 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 12/MK/EF.2/2026, 17 Maret 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 18 Maret 2026 Sampai Dengan 31 Maret 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/MK/EF.2/2026, 30 Maret 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 April 2026 Sampai Dengan 7 April 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/MK/EF.2/2026, 31 Maret 2026.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2026 Sampai Dengan 30 April 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/MK/EF.2/2026, 7 April 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 April 2026 Sampai Dengan 14 April 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/MK/EF.2/2026, 14 April 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 April 2026 Sampai Dengan 21 April 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 17/MK/EF.2/2026, 21 April 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 April 2026 Sampai Dengan 28 April 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/MK/EF.2/2026, 28 April 2026.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 April 2026 Sampai Dengan 5 Mei 2026.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 19/MK/EF.2/2026, 30 April 2026.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan

Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2026 Sampai Dengan 31 Mei 2026
--

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.